

BAB II

GAMBARAN UMUM

1.1. Gambaran Umum Kabupaten Klaten

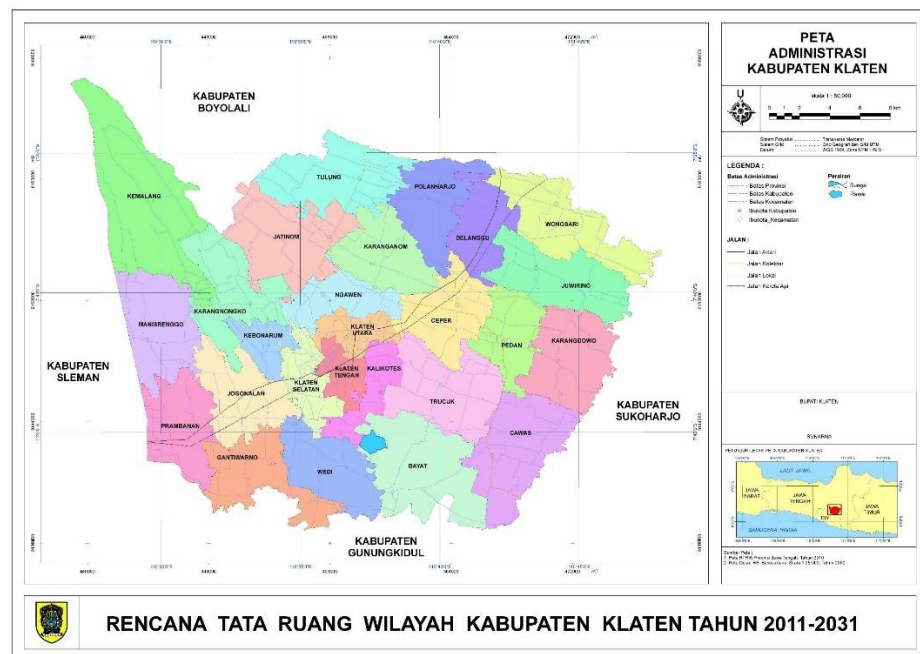
Tinjauan umum ini memberikan gambaran mengenai kondisi di Kabupaten Klaten, yang menjadi lokasi pelaksanaan penelitian. Pada subbab ini dijabarkan mengenai kondisi geografis, administratif, serta demografis Kabupaten Klaten. V Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026, tercantum Visi dan Misi pembangunan daerah tersebut. Adapun Visinya adalah *“Terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”*. Kabupaten Klaten telah menetapkan enam misi untuk mencapai visi tersebut, antara lain:

- 1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian.
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
- 3) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
- 4) Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
- 5) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
- 6) Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

1.1.1. Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, diapit oleh Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Secara geografis, wilayah ini terletak di antara $7^{\circ}32'19''$ hingga $7^{\circ}48'33''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}26'14''$ hingga $110^{\circ}47'51''$ Bujur Timur. Berikut batas-batas daerah Kabupaten Klaten:

- Kabupaten Boyolali di bagian Utara.
- Kabupaten Sukoharjo di bagian Timur.
- Kabupaten Gunungkidul (DIY) di bagian Selatan.
- Kabupaten Sleman (DIY) di bagian Barat.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Dari segi posisi wilayah, Kabupaten Klaten berada pada jalur strategis yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Meski demikian, fungsinya saat ini lebih banyak sebagai daerah perlintasan dibandingkan sebagai simpul utama pergerakan. Kondisi ini, ditambah dengan hirarki pelayanan yang masih di bawah Surakarta dan Yogyakarta, membuat potensi pengembangan wilayah belum sepenuhnya optimal.

Meski demikian, Kabupaten Klaten tetap memiliki potensi unggulan yang berperan penting di tingkat provinsi maupun nasional. Kabupaten Klaten dikenal sebagai salah satu lumbung padi utama di Jawa Tengah dan memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah *hinterland* dari Surakarta dan Yogyakarta, Klaten berperan dalam penyediaan serta distribusi hasil pertanian, sekaligus aktivitas perdagangan dan jasa di sepanjang koridor Yogyakarta–Surakarta. Selain itu, wilayah ini juga termasuk dalam Kawasan Penyangga Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur–Yogyakarta–Prambanan, yang semakin menegaskan arti penting Klaten dalam konteks pembangunan regional.

1.1.2. Wilayah Administratif Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten meliputi 26 kecamatan dengan total 391 desa dan 10 kelurahan (BPS Kabupaten Klaten, 2024). Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Kecamatan terluas di Kabupaten Klaten adalah

Kecamatan Kemalang. Rincian luas wilayah beserta jumlah desa di setiap kecamatan Kabupaten Klaten ditampilkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Dirinci per Kecamatan Kabupaten Klaten

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)		Jumlah Desa
		Ha	%	
1.	Prambanan	2.609,46	3,72	16
2.	Gantiwarno	2.644,45	3,77	16
3.	Wedi	2.625,81	3,74	19
4.	Bayat	4.209,70	6,00	18
5.	Cawas	3.593,54	5,12	20
6.	Trucuk	3.468,60	4,91	18
7.	Kalikotes	1.410,87	2,01	7
8.	Kebonarum	1.041,62	1,48	7
9.	Jogonalan	2.759,33	3,93	18
10.	Manisrenggo	3.060,27	4,36	16
11.	Karangnongko	2.949,17	4,20	14
12.	Ngawen	1.845,49	2,63	13
13.	Ceper	2.576,67	3,67	18
14.	Pedan	1.999,90	2,85	14
15.	Karangdowo	3.080,17	4,39	19
16.	Juwiring	3.090,11	4,40	19
17.	Wonosari	3.340,06	4,76	18
18.	Delanggu	2.003,01	2,86	16
19.	Polanharjo	2.521,57	3,59	18
20.	Karanganom	2.561,67	3,65	19
21.	Tulung	3.444,00	4,91	18
22.	Jatinom	3.710,97	5,29	18
23.	Kemalang	6.019,13	8,58	13
24.	Klaten Selatan	1.509,12	2,15	12
25.	Klaten Tengah	959,45	1,37	9
26.	Klaten Utara	1.117,36	1,59	8
Jumlah		70.152,02	100	401

Sumber: (BPS Kabupaten Klaten, 2025; Pemerintah Kabupaten Klaten, 2021)

1.1.3. Kondisi Topografi Kabupaten Klaten

Wilayah Kabupaten Klaten memiliki ketinggian bervariasi antara 100 hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayahnya sekitar 83,52% terletak antara 100-500 mdpl, sekitar 3,72% pada 0–100 mdpl, dan 12,76% berada pada 500–2.500 mdpl. Kabupaten Klaten dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian ditinjau dari topografinya, yaitu:

- 1) Bagian utara merupakan kawasan lereng Gunung Merapi yang mencakup sebagian kawasan Kecamatan Jatinom, Kemalang, Tulung, dan Karangnongko.
- 2) Sebagian besar kecamatan terletak di dataran rendah bagian Tengah.
- 3) Bagian selatan terdiri atas kawasan perbukitan kapur yang mencakup sebagian kawasan Kecamatan Gantiwarno, Cawas, dan Bayat.

Dari sisi kelerengan, mayoritas wilayah Klaten termasuk datar dengan kemiringan 0–5%, khususnya di bagian tengah hingga selatan. Sementara itu, wilayah utara, terutama Kecamatan Kemalang yang berada di lereng Merapi, memiliki kelerengan lebih dari 40%. Kondisi ini memperlihatkan bahwa mayoritas kawasan Kabupaten Klaten mengandung potensi lingkungan yang baik untuk kegiatan budidaya maupun pembangunan.

1.1.4. Kondisi Demografis Kabupaten Klaten

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten (2025), jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2024 mencapai 1.302.648 jiwa, terdiri dari 647.853 laki-laki dan 654.795 perempuan. Komposisi

penduduk menunjukkan bahwa kelompok usia 40–44 tahun merupakan yang paling dominan dengan total 99.960 jiwa, sementara kelompok usia 70–74 tahun menjadi yang paling sedikit dengan jumlah 38.629 jiwa.

Tabel 2. 2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Prambanan	53.155	4,08	2.037,37
2.	Gantiwarno	39.194	3,01	1.482,38
3.	Wedi	52.878	4,06	2.013,63
4.	Bayat	64.539	4,95	1.532,99
5.	Cawas	58.471	4,49	1.626,91
6.	Trucuk	80.923	6,21	2.332,75
7.	Kalikotes	37.807	2,90	2.679,45
8.	Kebonarum	19.973	1,53	1.916,79
9.	Jogonalan	60.168	4,62	2.180,79
10.	Manisrenggo	44.249	3,40	1.446,05
11.	Karangnongko	37.649	2,89	1.276,67
12.	Ngawen	46.330	3,56	2.511,11
13.	Ceper	66.205	5,08	2.569,07
14.	Pedan	47.803	3,67	2.390,15
15.	Karangdowo	43.950	3,37	1.425,56
16.	Juwiring	59.375	4,56	1.921,52
17.	Wonosari	64.387	4,94	1.928,91
18.	Delanggu	42.605	3,27	2.127,06
19.	Polanharjo	41.435	3,18	1.642,94
20.	Karanganom	47.453	3,64	1.852,19
21.	Tulung	55.157	4,23	1.601,54
22.	Jatinom	62.064	4,76	1.672,43
23.	Kemalang	40.656	3,12	675,46
24.	Klaten Selatan	45.399	3,49	3.008,55
25.	Klaten Tengah	41.763	3,21	4.354,85
26.	Klaten Utara	49.060	3,77	4.392,12
Jumlah		1.302.648	100	1.856,95

Sumber: (BPS Kabupaten Klaten, 2025)

Berdasarkan persebaran per kecamatan, jumlah penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Trucuk sebanyak 80.923 jiwa (6,21%), sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Kebonarum dengan 19.973 jiwa (1,53%). Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Klaten

pada tahun 2024 secara keseluruhan mencapai 1.856,95 jiwa/km². Kecamatan Klaten Utara menjadi wilayah terpadat dengan 4.392,12 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Kemalang merupakan wilayah dengan kepadatan terendah, yaitu 675,46 jiwa/km².

1.2.Profil Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Klaten merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai upaya menyederhanakan akses masyarakat dalam memperoleh beragam layanan publik secara terpadu di satu lokasi. Pembentukan MPP di Kabupaten Klaten diatur melalui Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. MPP diresmikan melalui *grand launching* pada 1 Desember 2022, setelah diluncurkan secara terbatas pada 22 November 2022 (Dinas Pendidikan Klaten, 2022).

Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten beralamat di Jl. Mayor Kusmanto, Sungkur, Semangkak, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan Kode Pos 57415. Gedung MPP Kabupaten Klaten berada dalam satu kawasan dengan Gedung Dharma Wanita dan Taman Kuliner MPP Klaten. Pengelolaan MPP dilaksanakan secara *ex-officio* oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten.

Sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan, MPP Kabupaten Klaten mempunyai Maklumat Pelayanan, yaitu *“Dengan ini, kami seluruh Penyelenggara Pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan*

yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bersedia memberikan kompensasinya”. Selain itu, terdapat pula Komitmen Bersama Penyelenggaraan MPP Kabupaten Klaten. Pernyataan ini berisi kesepakatan antarinstansi yang tergabung di MPP untuk bersama-sama memberikan pelayanan publik di satu lokasi terpadu. Komitmen tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P., Bupati Klaten, Hj. Sri Mulyani, S.M., bersama perwakilan dari masing-masing instansi pada 22 November 2022.



Gambar 2. 2 Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Klaten

Sumber: Google Maps MPP Kabupaten Klaten

Kantor MPP Kabupaten Klaten terdiri dari dua lantai yang seluruhnya digunakan sebagai ruang pelayanan dari berbagai instansi. Gedung ini juga difungsikan sebagai kantor DPMPTSP Kabupaten Klaten. Hingga saat ini, terdapat 20 instansi yang masih aktif memberikan pelayanan di MPP Kabupaten Klaten. Daftar instansi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Instansi yang Membuka Layanan di MPP Klaten Tahun 2024

No.	Nama Instansi	Jumlah Layanan	Jenis Layanan
1.	BPD (Bank Jateng)	2	1. Pembayaran Pajak dan Retribusi 2. Pelayanan PPOB
2.	Samsat	1	Pemungutan PAD dari sektor Pajak Tahunan kendaraan bermotor
3.	Kejaksaan Negeri	3	1. Pelayanan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara 2. Pelayanan tilang 3. Pelayanan pengambilan barang bukti
4.	Pengadilan Negeri	5	1. Informasi pendaftaran perkara melalui E-Court 2. Konsultasi/Advis Hukum 3. Informasi proses persidangan melalui E-Court 4. Permintaan informasi publik yang diatur pada SK KMA 1-144/KMA/SK.I/2011 5. Informasi pembuatan surat keterangan melalui aplikasi eraterang
5.	KPP Pratama	5	1. Asistensi pendaftaran NPWP 2. Asistensi pembuatan kode billing 3. Asistensi layanan mandiri pelaporan SPT Tahunan 1770 S dan 1770 SS secara <i>online</i> . 4. Informasi konfirmasi status wajib pajak 5. Konsultasi pajak
6.	BPJS Kesehatan	2	1. Pendaftaran kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah Kerja 2. Penyampaian informasi
7.	BPJS Ketenagakerjaan	2	1. Pendaftaran kepesertaan 2. Informasi program dan tata cara klaim BPJS TK
8.	PT TASPEN	1	Informasi Taspen
9.	Polres Klaten	2	1. Pelaporan kehilangan 2. Perpanjangan SKCK
10.	Dinas Kesehatan	51	1. Rekomendasi izin bidang kesehatan (43 jenis) 2. UHC (<i>Universal Health Covered</i>) 3. Pergantian peserta Jamkesda 4. Permintaan data Jamkesda

No.	Nama Instansi	Jumlah Layanan	Jenis Layanan
			5. Rekomendasi untuk PGOT 6. Pendaftaran bayi baru lahir 7. Surat terdaftar penyehatan tradisional 8. Sertifikat penyuluhan keamanan pangan 9. Standar Berusaha Fasilitas Kesehatan
11.	Disdukcapil	6	1. Kartu Keluarga 2. Data kependudukan 3. Akta kelahiran 4. Pencetakan KTP Elektronik 5. Akta kematian 6. Kartu Identitas Anak (KIA)
12.	BPN	3	1. Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) 2. Informasi pertanahan 3. Perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal
13.	DPUPR	6	1. Informasi tata ruang 2. Persetujuan Bangunan Gedung 3. Pelayanan sampah 4. Pelayanan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja 5. Pelayanan pemakaman umum 6. Pelayanan perizinan tanah pengairan
14.	BPKPAD	4	1. Pelayanan pajak reklame 2. ID Billing pajak daerah 3. Pelayanan BPHTB 4. Konsultasi pajak daerah
15.	Disperakim	2	1. Sewa Gedung Sunan Pandanaran 2. Sewa Alun-Alun
16.	Disperinaker	5	1. Pelayanan AK I sd AK V 2. Verifikasi akun siap kerja CPMI 3. Verifikasi perjanjian penempatan 4. Rekam IM JAPAN 5. Konsultasi Naker DN/LN
17.	DPMPTSP		
	Klaten	51	1. Persetujuan Bangunan Gedung 2. Izin penyelenggaraan reklame 3. OSS

No.	Nama Instansi	Jumlah Layanan	Jenis Layanan
			4. Surat izin praktek kesehatan (43 jenis) 5. KKPR 6. Izin praktek veteriner (4 jenis)
	Prov Jawa Tengah	1	Izin yang menjadi kewenangan Provinsi
18.	Kementerian Agama	1	Sertifikasi halal
19	Dinas Pendidikan	13	1. Pendirian sekolah SD/SMP 2. Surat rekomendasi pindah sekolah 3. Surat keterangan ijazah rusak 4. Surat keterangan kehilangan ijazah 5. Legalisasi ijazah 6. Surat keterangan kesalahan penulisan ijazah 7. Legalisasi piagam 8. Permohonan pembuatan nomor identitas sekolah dan nomor statistik sekolah 9. Permohonan pembuatan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 10. Pencairan tunjangan profesi guru 11. Pengesahan kurikulum tingkat satuan pendidikan 12. Pendirian operasional PAUD 13. Pendirian operasional LKP dan PKBM
20.	DINSOSP3APPKB	5	1. Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan 2. Pengajuan santunan sosial kemasyarakatan 3. Penanganan anak berhadapan dengan hukum 4. Pelayanan kontrasepsi 5. Pengajuan pengangkatan anak/adopsi

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

MPP Kabupaten Klaten dirancang untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dengan suasana yang nyaman bagi masyarakat.

Seluruh ruangan telah dilengkapi pendingin udara (AC), sehingga mendukung kenyamanan pengguna layanan. Selain itu, berbagai fasilitas atau sarana dan prasarana juga disediakan, antara lain:

1. Area parkir, disediakan cukup luas guna menampung kendaraan roda empat dan dua, sehingga memudahkan pengunjung yang datang.
2. *Information center*, berada tepat di depan pintu masuk dan berfungsi sebagai pusat informasi untuk membantu pengunjung mendapatkan arahan mengenai jenis layanan maupun lokasi gerai yang dituju.
3. Mesin antrean, digunakan untuk memperlancar proses pelayanan agar lebih tertib, teratur, dan rapi.
4. Ruang tunggu, dilengkapi kursi yang nyaman agar masyarakat dapat menunggu dengan lebih tenang sebelum mendapatkan pelayanan.
5. Toilet, tersedia di setiap lantai dan termasuk fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga ramah untuk semua kalangan.
6. Mushola, yang dapat digunakan masyarakat maupun pegawai untuk melaksanakan ibadah dengan nyaman.
7. Pojok baca digital, perpustakaan yang menyediakan berbagai koleksi buku yang dapat dibaca langsung oleh pengunjung saat berada di MPP.
8. *Playground* anak, sehingga orang tua yang membawa anak dapat merasa lebih tenang karena anak-anak memiliki ruang bermain
9. *Charging box*, tersedia bagi pengunjung yang membutuhkan pengisian daya ponsel atau perangkat elektronik ringan lainnya dengan 10 titik colokan listrik.

10. Lift, untuk memudahkan akses antar lantai terutama bagi lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.
11. Pos satpam, sebagai bentuk dukungan keamanan dan kenyamanan selama berada di lingkungan MPP.
12. Tempat fotokopi, berlokasi di halaman gedung dan dikelola oleh PT Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten, sehingga mempermudah pengunjung yang membutuhkan layanan administrasi secara mendadak seperti fotokopi atau pencetakan dokumen.

1.3.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Kabupaten Klaten

Instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sekaligus pengoperasian Mal Pelayanan Publik (MPP), yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten. Terkait penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022 menetapkan fungsi DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP. Dengan kedudukan tersebut, DPMPTSP berperan *ex-officio* sebagai pengelola utama MPP, baik dalam hal koordinasi antarinstansi maupun penyediaan sarana dan prasarana pelayanan.

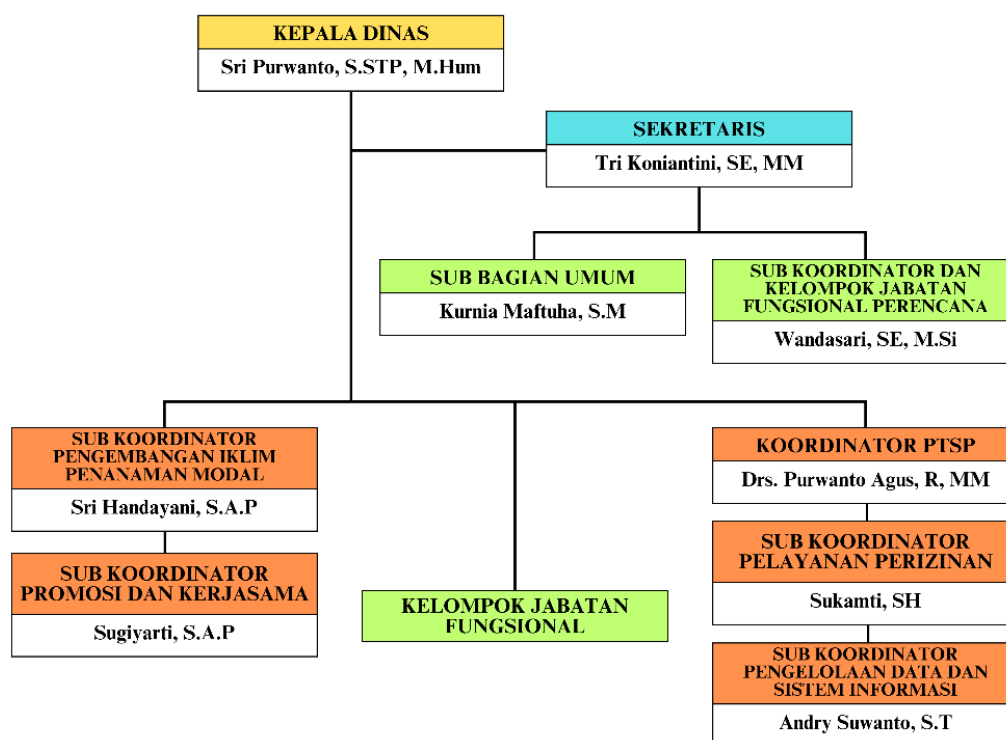
Sebagai penyelenggara MPP, DPMPTSP Kabupaten Klaten memiliki tugas utama melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan publik dan memastikan tersedianya fasilitas yang memadai di setiap gerai pelayanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPMPTSP menjalankan beberapa fungsi penting, yaitu:

- a. Penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan.
- b. Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP.
- c. Pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP.
- d. Penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan.
- e. Penyediaan tata tertib.
- f. Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan pengaduan MPP.
- g. Pemantauan serta evaluasi penyelenggaraan MPP.

DPMPTSP Kabupaten Klaten memiliki motto “Selalu Prima dalam Pelayanan.” Visi yang diusung adalah terwujudnya pelayanan prima dalam bidang perizinan serta tumbuhnya investasi daerah untuk menunjang pembangunan daerah yang mandiri, demokratis, adil, makmur, dan bermanfaat. Untuk mewujudkan visi tersebut, DPMPTSP menetapkan lima misi, yaitu:

- 1. Mewujudkan pelayanan perizinan secara mudah, cepat, tepat, dan transparan.
- 2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam perizinan.
- 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang berkompeten.
- 4. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja serta media informasi perizinan.
- 5. Mengkoordinasikan pengembangan potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan peluang investasi.

Struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Klaten tersaji pada Gambar 2.3 berikut. Bagan ini memperlihatkan susunan jabatan dan alur koordinasi yang menjadi dasar pelaksanaan tugas DPMPTSP.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Klaten

Sumber: *Website* resmi DPMPTSP Kabupaten Klaten

Struktur tersebut menunjukkan bahwa Kepala Dinas menjadi penanggung jawab utama, sedangkan Sekretaris Dinas berperan dalam mengoordinasikan pelaksanaan teknis dan operasional MPP sehari-hari. Melalui penyelenggaraan MPP, peran DPMPTSP tidak lagi terbatas pada urusan perizinan dan penanaman modal saja, melainkan meluas pada koordinasi lintas instansi untuk menyediakan layanan publik yang menjadi terintegrasi, mudah dijangkau, serta berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Klaten.